

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

Penelitian ini dilandasi oleh teori-teori yang berkaitan dengan pengungkapan sukarela, teori tersebut meliputi: teori keagenan (*agency theory*), teori sinyal (*signaling theory*), laporan keuangan, laporan tahunan, dan pengungkapan sukarela serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi variabel: ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, proporsi kepemilikan saham, dan proporsi dewan komisaris independen.

2.1.1. Teori keagenan.

Teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling, (1976). Teori ini dianalogikan manajemen sebagai agen, dan pihak pemegang saham sebagai prinsipal. Dalam hubungan antara prinsipal dan agen, prinsipal mengajak agen untuk melayani kepentingan prinsipal dan mendelegasikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian sebagai wujud pertanggungjawaban, sebagai agen akan berusaha untuk memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dalam hal pengungkapan sukarela yang lebih luas. (Mujiyono, 2004 dalam Primastuti, 2012).

Berdasarkan perspektif teori keagenan, informasi yang disajikan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemilik dan manajer, serta dapat dijadikan oleh pemegang saham dan

stakeholder lainnya untuk mengontrol aktivitas manajer. (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Primastuti, 2012).

Salah satu sifat asumsi dasar manusia adalah *self interest* yang artinya adalah mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain. Pemilik modal sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola kekayaan, mempunyai kepentingan meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui pembagian deviden. Sedangkan dari sisi pihak manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan juga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kekayaan dirinya melalui kompensasi. Kondisi ini menyebabkan para manajer untuk tidak memberikan informasi yang berpengaruh negative terhadap kepentingan tersebut (Wicaksono, 2011). Konflik kepentingan seperti ini terjadi karena terdapat perbedaan tujuan dari masing-masing pihak, baik manager sebagai agen maupun pemilik modal sebagai prinsipal.

Laporan keuangan yang diungkapkan dapat mengontrol dan mengurangi konflik agensi, dan mekanisme lain seperti pasar efisien untuk pengendalian perusahaan, peraturan pemerintah dan program kepemilikan saham oleh manajerial. Adhi (2012) mengatakan alat kontrol tersebut berupa informasi melalui pengungkapan sukarela pada laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan sukarela yang diungkapkan, maka masalah agensi yang timbul juga akan semakin sedikit.

2.1.2. Teori sinyal (*Signaling theory*)

Informasi dalam laporan keuangan merupakan sinyal bagi para investor dalam memberikan prospek atau pandangan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan oleh manajemen harus dapat dipercaya, lengkap, dan tepat waktu, sehingga memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Keputusan tepat yang diambil investor sebelum berinvestasi akan berdampak pada hasil (*feedback*) yang sesuai harapan (Wijayanti, 2013).

Sulistyanto (2008) dalam Adhi (2012) memaparkan bahwa teori sinyal pada dasarnya merupakan penggunaan laporan keuangan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal positif atau negatif kepada para pemakainya. Sehingga pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan merupakan jalan untuk memberikan sinyal kepada publik, dimana sinyal tersebut merupakan media untuk menunjukkan bagaimana gambaran kondisi perusahaan. Oleh karenanya penyampaian sinyal oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan memberikan segala informasi mencakup keuangan dan non keuangan yang transparan (Adhi, 2012).

Menurut Hartono (2005) dalam Suta (2012) teori signaling menyatakan perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan

dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Sinyal yang dimaksud merupakan penyampaian informasi pada pasar (publik) mengenai informasi perusahaan secara lengkap, transparan, dan akurat.

Sinyal-sinyal juga dapat dilakukan perusahaan pada laporan tahunannya dengan memberikan informasi yang lengkap dan transparan. Laporan tahunan yang relevan, penuh, dan transparan dapat memberikan sinyal-sinyal positif dari perusahaan kepada *stakeholders* yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang akan diambil. Dalam hal pengungkapan informasi yang lengkap dan transparan ini dapat dilakukan dengan cara pengungkapan informasi yang bersifat sukarela. (Adhi, 2012)

2.1.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Indriani (2013) mengatakan laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi kreditor, investor, calon investor, pemerintah, manajemen perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan informasi perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK (2009) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengguna laporan tersebut meliputi investor, kreditor, dan pemakai lainnya.

2.1.4. Laporan Tahunan (*annual report*).

Laporan tahunan (*annual report*) adalah suatu dokumen yang diterbitkan tiap tahun oleh suatu emiten yang berisi laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan publik dan di dalamnya terdapat laporan keuangan perusahaan termasuk informasi tambahan mengenai perusahaan dan produknya serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan selama satu tahun (Anisa, 2010 dalam Indriani, 2013). Informasi-informasi tambahan tersebut meliputi profil, struktur, produk, manajemen, jumlah karyawan dan informasi lain yang bersifat sukarela.

Laporan tahunan (*annual report*) berisi kondisi keuangan perusahaan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan, dimana informasi yang di sajikan tersebut harus diungkapkan secara lengkap dan transparan sebagai alat menganalisis keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan dan juga dapat digunakan sebagai alat analisis prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam laporan tahunan (*annual report*) ada beberapa komponen utama, yaitu: sambutan untuk pemegang saham, ikhtisar

data keuangan, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban manajemen, hasil analisis manajemen, dan laporan hasil audit. Komponen-komponen tersebut membentuk sebuah laporan tahunan yang digunakan oleh para pemakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.5. Pengungkapan sukarela.

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dapat dengan leluasa dilakukan manajemen sesuai kepentingan perusahaan yang dianggap relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemakai laporan tahunan (*annual report*). Investor menggunakan informasi-informasi yang diungkapkan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasinya. Namun, informasi yang sifatnya wajib diungkapkan kini dirasa kurang mencukupi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga pengungkapan sukarela menjadi informasi yang sangat penting bagi investor dalam membuat keputusan investasinya. Pengungkapan sukarela antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda-beda, hal itu karena memang tidak adanya aturan khusus atau standar yang mengatur tentang pengungkapan sukarela.

Standar-standar akuntansi yang ada biasanya tidak mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaannya secara maksimal, namun tidak menghalangi manajemen untuk memberikan

tambahan pengungkapan informasi secara sukarela. Wicaksono (2011) mengatakan pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Manajemen perusahaan akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi tersebut lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkannya. Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditor memahami resiko investasi (Wicaksono, 2011).

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan merupakan media analisis dalam melakukan keputusan investasi karena investasi merupakan kegiatan yang penuh risiko dan ketidakpastian, maka pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan diharapkan mampu mengurangi keraguan para investor untuk berinvestasi. Para investor sangat membutuhkan informasi mengenai kondisi perusahaan yang dapat dipercaya, relevan, penuh dan transparan. Pengungkapan sukarela yang memberikan informasi pendukung lain mengenai perusahaan diharapkan mempermudah investor dalam melakukan analisis investasi kepada perusahaan. (Indriani, 2013).

2.1.6. Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Sukarela.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Suta dan Laksito (2012), Indriani dkk. (2014), dan Nuryaman

(2009) yang menemukan hasil secara umum bahwa pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh faktor karakteristik perusahaan. Karakteristik dalam perusahaan itu sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: struktur perusahaan, kinerja perusahaan, dan pasar perusahaan. Suta (2012) mengatakan struktur meliputi ukuran, umur, dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau *leverage*. Kinerja mencakup likuiditas perusahaan dan laba (profit). Sedangkan karakteristik yang berhubungan dengan pasar, ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kualitatif, misalnya tipe industri, tipe auditor, dan kepemilikan saham.

Kategori struktur perusahaan dibagi kedalam variabel-variabel yang terdiri dari ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage*. Kinerja perusahaan terdiri dari variabel likuiditas dan profitabilitas. Sedangkan kategori pasar terdiri dari proporsi kepemilikan saham publik dan proporsi dewan komisaris independen.

2.1.6.1. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan yang diukur dari rata-rata total penjualan untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun (Suryani, 2007 dalam Khakim (2013)). Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki perusahaan

atau total penjualan yang diperoleh (Indriani, 2013). Total aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa yang akan datang. Perusahaan dengan jumlah total aktiva yang besar disebut sebagai perusahaan yang besar.

Ukuran perusahaan mencerminkan jaringan operasional perusahaan. Perusahaan besar menghasilkan berbagai macam produk dan beroperasi lebih dari satu tempat, termasuk di luar negeri. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki sumberdaya manusia berketrampilan tinggi dalam rangka pengungkapan informasi. Oleh karenanya, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi dalam pengungkapan informasi (Wijayanti, 2013).

Ukuran perusahaan menurut Khakim (2013) dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu:

1) Ukuran total aktiva.

Aktiva yang dimiliki perusahaan terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, aktiva tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya. Cara mengukur ukuran total aktiva yaitu dengan mentransformasikan total aktiva ke dalam logaritma natural.

$$\text{Ukuran total aktiva} = Ln (\text{total aktiva})$$

2) Penjualan bersih.

Penjualan bersih yaitu total penjualan dari perusahaan yang merupakan salah satu unsur yang dapat digunakan untuk mengukur penapatan perusahaan. Penjualan bersih dapat di hitung dengan cara menghitung total pendapatan penjualan dan di kurangi faktor-faktor pengurang, seperti diskon, retur, dan biaya-biaya lain yang mengurangi penjualan.

Penjualan bersih = Penjualan kotor – Retur penjualan –Potongan penjualan.

3) Kapitalisasi Pasar.

Kapitalisasi pasar yaitu nilai saham yang harus di bayar untuk membeli seluruh perusahaan.

Kapitalisasi Pasar = Jumlah saham beredar x Harga saham akhir tahun.

2.1.6.2. Umur Perusahaan.

Umur perusahaan adalah lama waktu hidup suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing dalam dunia usaha dan mampu mempertahankan kesinambungan usahannya serta merupakan bagian dari dokumentasi yang menunjukkan dari tujuan perusahaan tersebut (Kusnia, 2013).

Perusahaan yang memiliki umur lebih panjang atau lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan lebih banyak pengalaman dalam mempublikasikan laporan tahunan, dan perusahaan yang memiliki pengalaman yang lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan

investor akan informasi perusahaannya. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan pengalaman lebih dalam. (Indriani, 2013).

Pengukuran yang digunakan dalam mengukur umur perusahaan ada dua cara yaitu dihitung dari tahun berdirinya perusahaan tersebut maupun tahun terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bestivano, 2013).

- 1) Tahun pendirian perusahaan.

Umur Perusahaan = tahun data penelitian – tahun pendirian perusahaan.

- 2) Tahun terdaftar.

Umur perusahaan = tahun data penelitian – tahun awal terdaftar di BEI.

2.1.6.3. Leverage.

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang, hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor (Indriani, 2013). *Leverage* dijadikan tolak ukur perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih luas dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya.

Dalam penelitian Wijayanti (2013) cara mengukur *leverage* yaitu:

1) *Debt to Asset Ratio*

Rasio ini mengukur berapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Rasio ini merupakan perbandingan total hutang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Cara mengukur *Debt to Asset Ratio* adalah:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

2) *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini merupakan perbandingan total hutang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri yang berasal dari pemegang saham. Cara mengukur *Debt to Equity Ratio* adalah:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas pemegang saham}} \times 100$$

3) *Debt to Total Capitalization Ratio (DTCR)*.

Rasio ini merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih mendalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang terhadap kapitalisasi. Rasio ini mengukur berapa besar modal jangka panjang perusahaan (*total capitalization*) yang di biayai oleh kreditor. Rasio ini diperoleh dengan perbandingan *long term debt* dengan *total capitalization*.

$$\text{DTCR} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Capitalization}} \times 100$$

2.1.6.4. Likuiditas.

Likuiditas adalah salah satu indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan lebih disukai investor karena mereka menganggap bahwa perusahaan akan mampu mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan beserta bunga yang telah disepakati ketika jatuh tempo. (Indriani, 2013)

Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang likuiditasnya tinggi akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Selain itu likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas rendah juga akan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pihak luar sebagai upaya menjelaskan lemahnya kinerja manajemen perusahaan tersebut.

Adapun cara mengukur likuiditas menurut Khakim (2013) yaitu:

1) *Current Ratio*

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan

hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Cara mengukur *current ratio* adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100$$

2) *Quick Ratio*

Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Cara mengukur *quick ratio* adalah:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100$$

3) *Cash Ratio*

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan kas yang tersimpan di bank.

Cara mengukur *cash ratio* adalah:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Sekuritas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100$$

2.1.6.5. Profitabilitas.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Perusahaan dengan laba yang baik akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan, sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan, guna meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Selain itu, rasio profitabilitas menjadi bentuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asset maupun modal perusahaan (Sjahrial dan Purba, 2011:40 dalam Wijayanti 2013). Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, dan akan semakin luas pengungkapan informasi yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menunjukkan kinerja perusahaan.

Adapun cara mengukur profitabilitas menurut Wijayanti (2013) yaitu:

1) *Gross Profit Margin* (GPM)

Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara membandingkan antara laba kotor dengan penjualan bersih. Cara mengukur *gross profit margin* adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

2) *Net Profit Margin* (NPM)

Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Cara mengukur *net profit margin* adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

3) *Return On Asset*

Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. Rumus menghitung *return on asset* adalah:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

4) *Return On Equity*

Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk pemegang saham dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. Rumus *return on equity* adalah:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100$$

5) *Operating Ratio*.

Operating Ratio merupakan rasio yang mengukur biaya operasi dari setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan.

2.1.6.6. Proporsi Kepemilikan Saham Publik (PKSP).

Kepemilikan perusahaan adalah saham yang dimiliki oleh publik atau sejumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Kepemilikan saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

pengungkapan sukarela. Nuryaman (2009) mengatakan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham, maka semakin luas pengungkapan informasi sukarela yang di laporkan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela yang lebih luas, hal ini karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang perusahaan, keputusan berinvestasi serta pengawasan kegiatan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Untuk mengukur proporsi kepemilikan saham yaitu dengan membagi jumlah saham publik dengan jumlah saham yang beredar. Rumus untuk menghitung proporsi kepemilikan saham publik menurut Suta (2012) yaitu:

$$PKSP = \frac{\text{Jumlah Saham Publik}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100$$

2.1.6.7. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI).

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, atau pejabat yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Unsur komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-

pihak lain yang terkait (Juniarti dan Sentosa, 2009:90 dalam Wijayanti, 2013).

Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2000) (Linoputri, 2010 dalam Primastuti, 2012).

Untuk mengukur proporsi dewan komisaris independen yaitu dengan cara membagi total dewan komisaris dengan total dewan komisaris. Rumus untuk menghitung proporsi dewan komisaris independen menurut Suta (2012) adalah:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}} \times 100$$

2.2. Kerangka Pemikiran.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan. Nuryaman (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan besar banyak disorot oleh publik dan analis pasar modal sehingga akan memberikan informasi yang lebih banyak.

Permanasari (2012), Adhi (2012), Suta dan Laksito (2012), dan Wijayanti (2013) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Selain itu, semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan lebih luas dibandingkan perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan pengalaman lebih dalam. Testiana (2011), dan Adhi (2012) mengungkapkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Krishna (2013) mengungkapkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka pengungkapan sukarela informasi laporan tahunan akan semakin tinggi, dan sebaliknya penurunan *leverage* akan berdampak pada penurunan nilai pengungkapan sukarela informasi laporan tahunan. Hasil tersebut didukung oleh Khakim (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

Fitriana dan Prastiwi (2014) dan Kartika (2009) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Hal tersebut berarti perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mendorong manajer untuk mengungkapkan laporan tahunannya lebih luas, termasuk di dalamnya informasi-informasi mengenai perusahaan secara sukarela.

Krishna (2013) mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas maka pengungkapan sukarela juga akan semakin meningkat, dan

begitu pula sebaliknya penurunan tingkat likuiditas maka akan berdampak pada penurunan pengungkapan sukarela informasi laporan tahunan pula. Hasil penelitian tersebut didukung Widianingsih (2011) dan Khakim (2013) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Selain itu, proporsi kepemilikan saham publik diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Indriani (2013) mengungkapkan bahwa semakin besar porsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik maka menuntut semakin luas pengungkapan sukarela perusahaan yang diungkapkan. Nuryaman (2009) mengungkapkan bahwa proporsi kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Fitriana dan Prastiwi (2014) mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Hal itu berarti semakin besar jumlah dewan komisaris independen terhadap total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan, maka aktivitas pengawasan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang berupa transparansi informasi akan berjalan lebih efektif sehingga manajemen akan terdorong untuk meningkatkan luas pengungkapan sukarela.

Untuk memahami pengaruh faktor-faktor karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela, maka diperlukan kerangka

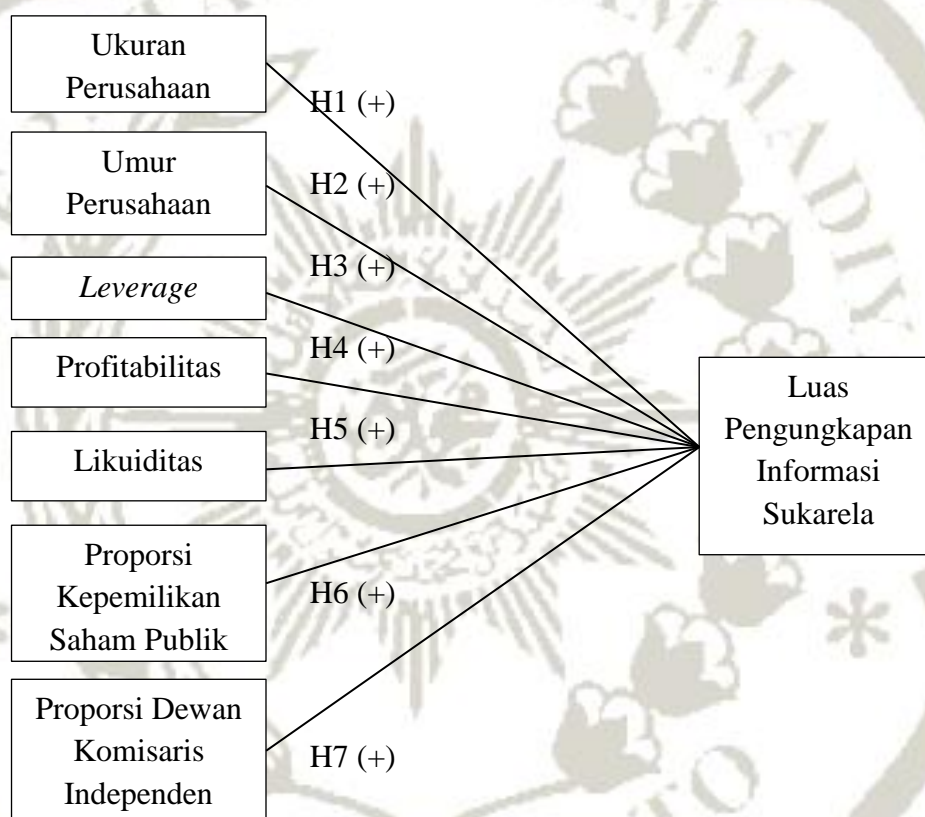
pemikiran. Untuk itu peneliti memaparkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran.

VARIABEL INDEPENDEN

VARIABEL DEPENDEN



2.3. Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Nuryaman (2009) mengungkapkan semakin besar ukuran perusahaan, maka pengungkapan sukarela pada pelaporan keuangan semakin meningkat. Prayogi (2003) dalam Adhi (2012) mengatakan bahwa perusahaan besar memiliki entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum, sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan menghindari resiko.

Suta dan Laksito (2012), Permanasari (2012), Mujiyono dan Nany (2010) serta Wijayanti (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

2.3.2 Hubungan umur perusahaan dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Indriani (2013) mengatakan semakin panjang umur *listing* perusahaan akan memberikan pengungkapan lebih luas dibandingkan

perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan tersebut memiliki pengungkapan laporan tahunan (*annual report*) dengan pengalaman lebih dalam. Adhi (2012) dan Testiana (2011) mengungkapkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

2.3.3 Hubungan *leverage* dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Al shamhari (2008) dalam Wijayanti (2013) mengemukakan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mengungkapkan informasi untuk memenuhi tuntutan dari pemegang saham karena resiko ekuitas yang lebih tinggi. Hal tersebut berarti semakin tinggi *leverage*, maka akan semakin luas pengungkapan informasi yang diungkapkan perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemegang saham dan untuk dapat menghilangkan keraguan para kreditor. Khakim (2013) dan Krishna (2013) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

2.3.4 Hubungan profitabilitas dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Rasio profitabilitas menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan (Suta, 2012). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mendorong manajer untuk mengungkapkan laporan tahunannya lebih luas, termasuk di dalamnya informasi-informasi mengenai perusahaan secara sukarela. Kartika (2009) dan Fitriana dan Prastiwi (2014) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

2.3.5 Hubungan likuiditas dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Indriani (2013) mengatakan, perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan lebih disukai investor karena mereka menganggap bahwa perusahaan akan mampu mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan beserta bunga yang telah disepakati ketika jatuh tempo. Widianingsih (2011), Khakim (2013), dan Krishna (2013) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H5: Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

2.3.6 Hubungan proporsi kepemilikan saham publik dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Perusahaan dengan mayoritas saham dimiliki oleh publik akan memberikan pengungkapan lebih luas dibanding dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Nuryaman (2009) mengatakan semakin tinggi proporsi kepemilikan saham, maka semakin luas pengungkapan informasi sukarela yang di laporkan perusahaan. Indriani (2013) dan Kartika (2009) mengungkapkan bahwa Proporsi kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H6: Proporsi kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.

2.3.7 Hubungan proporsi dewan komisaris independen dengan luas pengungkapan informasi sukarela.

Akhtaruddin, *et al*, (2009) dalam Wijayanti (2013) mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang tinggi berhubungan dengan transparansi perusahaan dalam bentuk luasnya pengungkapan informasi. Al Janadi (2013) dan Fitriana dan Prastiwi (2014) mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah:

H7: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela laporan tahunan.